

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuranji pada penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) masih belum sesuai terlaksana dengan Petunjuk teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana penyusunan RDKK hanya dilakukan oleh ketua kelompok tani dan Penyuluh Pertanian hal ini disebabkan kurangnya keinginan dan kesibukan anggota kelompok tani untuk datang bermusyawarah sehingga RDKK yang diajukan masih sama dengan RDKK pada tahun sebelumnya. Pada tahap penyaluran pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi. Pada pengawasan yang dilakukan oleh Tim KPPP di Kecamatan Kuranji yang didampingi Penyuluh Pertanian tidak melakukan pengawasan secara periodik (bulanan) hanya sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi yang diukur dalam enam indikator tepat, yaitu tepat harga, tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat mutu. Berdasarkan enam indikator enam tepat tersebut, 5 indikator yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat mutu dikategorikan efektif dan untuk indikator tepat harga dan tepat jumlah dikategorikan cukup efektif. Efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuranji Kota Padang ditingkat petani padi secara keseluruhan berdasarkan enam indikator tepat (6T) sudah terlaksana dengan efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada anggota kelompok tani dapat melaksanakan penyusunan RDKK hadir seluruh anggota dalam musyawarah dengan didampingi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

2. Diharapkan kepada Penyuluh Pertanian agar lebih memberikan informasi dan sosialisasi terkait pupuk bersubsidi kepada petani dan selalu mendampingi petani dalam menyusun RDKK agar kebutuhan pupuk yang diajukan dalam RDKK sesuai dengan kebutuhan pupuk petani dilapangan sehingga alokasi pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran dan petani dalam berusaha tani tidak lagi kesulitan dalam hal mendapatkan pupuk bersubsidi.
3. Diharapkan kepada pemerintah dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) untuk lebih memperketat pengawasan pupuk bersubsidi agar dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi lebih baik kedepannya.

